

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Uni Soviet merupakan salah satu negara yang besar sebelum terpecah menjadi negara-negara republik. Perpecahan tersebut terjadi setelah Mikhail Gorbachev memimpin Uni Soviet dengan menggunakan tiga strategi menuju demokrasi, yaitu Perestroika, Glasnot, dan Demokratizatsia. Sejak itu Rusia menjadi negara pewaris dari Uni Soviet, dengan Moskow tetap menjadi ibukotanya, dari alasan tersebut muncul pertanyaan bagaimana sistem politik Uni Soviet sebelum berubah menjadi Rusia. Selain alasan tersebut, seiring dengan berjalannya waktu yang akhirnya membawa Rusia pada masa sekarang ini yang telah dipimpin oleh seorang Vladimir Putin, dimana masa depan Rusia terletak ditangannya, melalui kebijakan-kebijakan atau keputusan yang diambilnya dalam menyelesaikan masalah negara. Hal inilah yang menjadi alasan penulis mengangkat judul **"Sosialisasi Politik Uni Soviet dan Rusia di Bawah Pemerintahan Joseph Stalin dan Vladimir Putin"**, dengan alasan ingin membandingkan proses sosialisasi politik pada dua masa yang berbeda di Rusia,

1.1

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut.

1. Sebagai manifestasi dari penerapan teori yang pernah penulis dapatkan selama duduk di bangku kuliah.
2. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sosialisasi politik di Uni Soviet pada pemerintahan komunis.
3. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sosialisasi politik di Rusia pada pemerintahan pasca reformasi.
4. Untuk mendapatkan gelar S1 Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Federasi Rusia sebuah negara yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.075.400 km<sup>2</sup>, Rusia menjadi negara terbesar di dunia dan di dalam persatuan USSR, dalam dunia politik juga Rusia menjadi negara yang paling berpengaruh dibandingkan dengan republik-republik lainnya yang membentuk Uni Soviet. Hal inilah yang membuat Rusia paling banyak mewarisi sistem pemerintahan dan ekonomi serta militer dari Uni Soviet. Selain itu, Rusia juga mewarisi dan menggantikan Uni Soviet dalam politik internasional terutama sebagai anggota dewan keamanan PBB yang memiliki hak Veto.

Rusia awal adalah sebuah kumpulan kota yang secara berangsur-angsur berkoalisi menjadi sebuah kekaisaran. Diawal abad 9, secara bersamaan

... dan ...

Eropa Barat dan rakyat Skandinavia yang dikenal sebagai Varangian menyeberangi laut Baltik dan mendarat di Eropa bagian Timur (Rusia).

- Bangsa Skandinavia yang dipimpin oleh tokoh semi legendaris Rurik pada tahun 862 M memasuki kota Novogrod dan memerintah disana. Pada tahun 882 menguasai Kiev, kota Slavia yang berkembang menjadi pusat perdagangan antara Skandinavia dan Konstantinopel. Pada tahun 989 Vladimir I meluaskan wilayahnya hingga Kaukasus dan Laut hitam serta mengambil ajaran Gereja Ortodoks Yunani. Kerajaan Kiev Rusia berakhir setelah serangan Mongol pada tahun 1237 oleh Batu Khan cucu Jenghis Khan.

Selanjutnya bangsa Mongol dikalahkan oleh Dimitri Donskoy pada tahun 1380 dengan kemenangan di Kulikovo. Kemudian daerah yang tercerai-berai disatukan kembali oleh Ivan IV, menaklukan Kazan (1552), Astrakhan (1516) serta menguasai Siberia. Pemerintahan dilanjutkan oleh penerusnya sampai bangsa Romanov naik tahta dengan diangkatnya oleh Michael Romanov sebagai Tsar (1613) yang menjadikannya sebagai dinasti Romanov selama 304 tahun dengan Tsar Nicholas II sebagai tsar terakhir sampai tahun 1917.

Pada Februari 1917 dibentuk Pemerintahan Provisi dibawah Pangeran Lyvov dan Alexander Kerensky sampai 25 Oktober 1917 yang digantikan dengan Pemerintahan Revolusi Bolshevik oleh Vladimir Ilyich Lenin (1922-1924), yang berakibat terjadinya perubahan sistem politik yaitu dari pemerintahan monarki (Tsar) menjadi pemerintahan negara federal otoriter (Lenin).

Pada periode selanjutnya, pemerintahan dilanjutkan secara diktator oleh Joseph Stalin (1924-1953), Nikita Khrushchev (1953-1964), Leonid Brezhnev (1964-1982), Yuri Andropov (1982-1984) dan Konstantin Chernenko (1984-1985).

yang mewujudkan Uni Soviet (Soviet yang berarti Dewan) dengan bergabungnya negara-negara di sekitar Rusia, kemudian dipimpin oleh Mikhail Gorbachev (1985-1991) dimana ditangan Gorbachev ini Pemerintahan Uni Soviet berakhir pada tanggal 25 Desember 1991 ditandai dengan berkibarnya bendera tiga warna Rusia di Kremlin.<sup>1</sup>

Sistem politik dari Rusia sendiri mempunyai struktur dasar yang menghendaki adanya perubahan secara besar-besaran di setiap cabang kekuasaan semenjak Uni Soviet runtuh. Rusia berusaha untuk membangun landasan politik yang dapat menjalankan fungsi pemerintah sebagai eksekutif, legislatif dengan baik. Rusia mengusahakan adanya partisipasi rakyat dalam sistem politik yang masih baru, yang akan terus dikembangkan di masa depan.

Pada masa kepemimpinan Gorbachev, Rusia mengalami perubahan sistem politik, perubahan ini terjadi juga pada masa pemerintahan Lenin, yang membedakan hanyalah perubahan pemerintahan monarki menjadi pemerintahan negara federal otoriter, sementara pada masa Gorbachev perubahan yang terjadi ialah perubahan paradigma kehidupan komunis menjadi kehidupan yang demokratis.

Mikhail Gorbachev berkuasa di USSR (*The Union of Soviet Socialist Republic*) tahun 1985, ia menjadi penerus dari sistem politik Uni Soviet yang kumulatif dan masif, yang pada kepemimpinan sebelumnya USSR menjalankan sistem politik Totaliter-Otokratis-Monolitik, dimana kebebasan individu merupakan hal yang mahal. Dalam hal ini kehendak negara harus identik total dengan kehendak individu.

Setelah Mikhail Gorbachev memimpin, Uni Soviet mengalami perubahan yang besar dalam sistem pemerintahan serta peta politiknya. Hal ini dikarenakan kegagalan sistem ekonomi dan politik yang selama ini diterapkan oleh negara tersebut. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk merombak dan mendobrak kemacetan-kemacetan dalam bidang politik, ekonomi serta kemandegan ideologis dan bidang-bidang lainnya.

Dengan melihat kegagalan tersebut maka Gorbachev pun kemudian meluncurkan 3 strategi pemikirannya yang dikenal dengan Perestroika, Glasnost, dan demokratisasi. Ketiga strategi ini digunakan oleh Gorbachev untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi USSR yang telah mengalami krisis kegagalan paradigma sosialis. Pemikiran Gorbachev dengan perubahan tersebut sebenarnya lebih dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi Uni Soviet yang sempat ambruk serta untuk mengejar keteringgalan Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya dibidang iptek dari negara-negara maju di Eropa terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat.<sup>2</sup>

Namun pemikiran Gorbachev tentang perubahan tersebut justru menimbulkan kenyataan yang sangat mengejutkan bagi dirinya sendiri, dimana harapannya untuk memperbaiki situasi dan kondisi didalam negerinya ternyata berakibat fatal. Pembaharuan yang diluncurkan oleh Gorbachev ternyata menyebabkan negara-negara republik yang dulu tergabung dalam USSR ingin melepaskan diri dari Uni Soviet. Reformasi yang dilakukan Gorbachev telah mengalami kegagalan dan kemudian menghadapi Uni Soviet pada dua masalah

---

<sup>2</sup> Drs. Soepeno Sumardjo, *Mikhail Gorbachev Tokoh Pembaharuan Abad Ini*, Penerbit Yayasan 17-8-45, Jakarta Pusat, hal.20

besar, yaitu masalah kehancuran ekonomi dan disintegrasi, dan pada akhirnya menyebabkan negara tirai besi tersebut *collapse*.

*Collapse*-nya Uni Soviet itu sendiri telah mengakibatkan beberapa perubahan besar dalam politik, baik politik dalam negeri maupun sistem politik internasional. Perubahan sistem politik internasional terjadi dari yang semula bipolar kemudian menjadi multipolar. Runtuhnya Uni Soviet juga berdampak terhadap orientasi politik luar negeri negara-negara komunis yang dulu merupakan klien dari Uni Soviet. Perubahan-perubahan yang terlihat setelah runtuhnya Uni Soviet yaitu: (1) Uni Soviet lebih intensif lagi mengadakan pendekatan ke Amerika Serikat-Eropa Barat untuk memperbaiki hubungan dan mengadakan kerjasama serta mencari dukungan terutama dukungan ekonomi. Pendekatan Uni Soviet ke Amerika Serikat-Eropa Barat untuk saling mengadakan perbaikan hubungan dan kerjasama ini telah menumbuhkan era baru yaitu era pasca perang dingin atau era kerjasama. (2) Peranan Uni Soviet sebagai *super power* rival Amerika Serikat telah bergeser, yang mengakibatkan lepasnya hegemoni Uni Soviet atas negara-negara satelit kliennya di Eropa Timur maupun wilayah lain. Meskipun dalam hal militer kekuatannya dapat dikatakan masih seimbang dengan Amerika Serikat, namun dengan bergesernya peranan Uni Soviet sebagai *Super Power* telah menjadikan Amerika Serikat sebagai *sole super power* yang dalam percaturan politik akan bertindak leluasa tanpa adanya ancaman dan kekuatan sebanding seperti sebelumnya. (3) Berkaitan dengan poin 1 dan 2 diatas, perubahan politik luar negeri dan bergesernya peranan serta hegemoni Uni Soviet terhadap Blok Timur dengan Barat yang berarti pula berubahnya konfigurasi sistem internasional yang bipolar menjadi multipolar. (4) Uni Soviet yang

sebelumnya telah memberi bantuan kenegara-negara kliennya, terpaksa tidak dapat memberikan bantuannya terutama setelah mereka mengalami keruntuhan ekonomi. (5) Perubahan Uni Soviet berpengaruh besar terhadap negara-negara kliennya yang kemudian banyak mengikuti langkah Uni Soviet mengadakan pendekatan dengan Amerika Serikat dan Barat guna mencari bantuan sebagai alternatif dari terhentinya bantuan dari Uni Soviet.<sup>3</sup>

Setelah ambruknya perekonomian Uni Soviet, negara tersebut terus mengalami tekanan dari dalam negerinya sendiri. Hal ini terlihat dari kuatnya tekanan negara-negara Republik yang tergabung dalam USSR untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Yang pada akhirnya Gorbachev tidak sanggup untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan USSR dari ancaman disintegrasi. Dan semua itu terbukti dengan ditandai runtuhnya rezim komunis Uni Soviet pada tahun 1991.

Tekanan dinamika baik internal maupun eksternal semakin kuat dirasakan oleh negara-negara republik yang tergabung dalam Uni Soviet. Hal tersebut dipahami karena terjadinya kemandegan ekonomi, teknologi dan beban hutang yang semakin besar, hingga akhirnya mencapai titik kritis, maka seruan Glasnost dan Perestroika pun memicu meledaknya revolusi sosial dinegara-negara tersebut. Satu persatu negara-negara republik tersebut melepaskan diri dari partai komunis dan menggantinya dengan sistem yang lebih demokratis, meskipun masih berhaluan pada sosialis.

---

<sup>3</sup> Jusuf Wanandi, "Perubahan-Perubahan Strategis Dalam Percaturan Politik Internasional Memasuki Dasawarsa 1990-an" 4 April 1990 hal 20

Didalam struktur politik pemerintahan USSR (1985), ada 3 lembaga (struktur) penting yang menjadi pusat kekuasaan politik. Ketiga lembaga itu adalah: *pertama*, PKUS (Partai Komunis Uni Soviet) yang menjadi satu-satunya partai politik yang ada di Uni Soviet guna menjadi jalan meraih kekuasaan, yang *kedua*, parlemen dan yang *ketiga* adalah dewan menteri.

Secara formal, parlemen memegang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Akan tetapi dalam kenyataannya kekuasaan tersebut didelegasikan kepada kabinet dan badan peralihan. Parlemen Uni Soviet sendiri terbagi menjadi 2 kamar yaitu *The Soviet Of Nationalities (Upper Council)* yang merupakan majelis tinggi yang mewakili 15 utusan dari 15 negara bagian dan beranggotakan 1500 orang. Dan yang satunya adalah *The Soviet Of The Union (Lower Council)* atau majelis rendah dan untuk mewakili seluruh negeri (Kongres Perwakilan Rakyat) dengan utusan dari distrik dengan jumlah penduduk sama (300 ribu/1 utusan).

Majelis tinggi soviet dipilih setiap 1 tahun sekali dan bersidang minimal sekali dalam 1 tahun. Badan ini juga mempunyai panitia (committee) tetap 15 orang, yang memiliki hak mengesahkan dan mengubah konstitusi USSR sampai memilih dan mengangkat menteri-menteri kabinet. Bagian lain parlemen adalah majelis rendah. Majelis rendah ini memiliki hak sebagai wakil rakyat, mengawasi semua badan negara, tetapi tidak memiliki hak-hak legislatif sebesar majelis tinggi.

Selain kedua badan, terdapat juga Presidium Soviet Tertinggi yang beranggotakan 20 orang yang dipilih oleh Soviet Tertinggi (Majelis Tinggi)



pemerintahan yang dilakukan pada masa Uni Soviet. Selain itu budaya politik yang melekat pada masa Uni Soviet masih menempel kuat di Rusia.

Sistem politik pemerintahan Republik Federasi Rusia pasca Perang Dingin jauh berbeda dengan apa yang mereka terapkan pada masa Uni Soviet. Hal ini disebabkan karena kondisi domestik Rusia mengalami perubahan terus-menerus dan kekacauan terjadi disegala aspek kehidupan terutama dalam bidang politik, hankam, serta bidang ekonomi. Kebingungan dan ketidakjelasan institusi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara dialami pada masa Boris Yeltsin, pemimpin Republik Federasi Rusia pertama yang mengusung panji-panji demokrasi dalam sistem ekonomi dan politik pemerintahannya, terutama untuk memulihkan perekonomian Rusia. Strategi perubahan Yeltsin yang lebih demokratis merupakan kelanjutan dari reformasi Gorbachev, dimana operasional pemerintahan kemudian dilakukan secara bertahap sejak mulai berdirinya Republik federasi Rusia pada tahun 1992. Rusia muncul sebagai negara baru yang mempunyai keinginan kuat untuk menjadi negara demokratis, yang menghantarkan Rusia kepada prestasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain yang masih belajar tentang bagaimana kehidupan berdemokrasi.<sup>6</sup>

Tahun 1996 dilaksanakan pemilihan presiden, hal ini menunjukkan bahwa semua aktor politik di Rusia menyetujui seperangkat aturan rivalitas politik yang baru yakni melalui pemilihan umum. Mereka melihat bahwa pemilu merupakan *legitimate means to political power*. Dengan demikian, melalui pemilu tersebut Rusia telah melengkapi transisi pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokrasi (*electoral democracy*). Akan tetapi, konsep *electoral democracy* itu

ditambah ketua, sekretaris, dan deputi. Berdasarkan konstitusi 1977, Presidium Soviet Tertinggi mempunyai wewenang terbesar dibanding Soviet Tertinggi.

Dewan Menteri (Kabinet) dipimpin oleh seorang ketua (Perdana Menteri) merangkap sebagai kepala pemerintahan USSR dan selalu dijabat oleh sekretaris jenderal (sekjen) PKUS. Dewan menteri juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan keputusan hukum dan UU. Dewan menteri ini merupakan organ kekuasaan negara tertinggi bidang eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presidium Soviet Tertinggi (PST) dan Soviet Tertinggi (ST).<sup>4</sup>

Setelah terpecahnya Uni Soviet, maka mulai terbentuklah identitas Rusia yang merupakan perjalanan panjang dari sejarah Rusia yang penuh dengan kegetiran dan menyakitkan. Terbentuknya identitas Rusia tersebut tidak dapat dinyatakan dengan tanggal, bulan, ataupun dengan tahun. Sejarah Rusia secara keseluruhan merupakan proses yang berlangsung terus-menerus yang mewarnai identitas itu dari masa ke masa. Namun dari sejarah itu dapat dipahami bagaimana karakter Rusia yang turut menentukan lahirnya negara Uni Soviet sampai akhir dari episode Uni Soviet.<sup>5</sup>

Kemunculan Republik Federasi Rusia pada awal dasawarsa 90'an, pada dasarnya adalah sebagai kisah lanjutan dari reformasi yang dilakukan oleh Gorbachev dengan Perestroikanya pada masa Uni Soviet. Hal ini terlihat dari sistem politik pemerintahan yang diterapkan di Rusia, yang sebenarnya lebih merupakan kelanjutan dari reformasi Gorbachev terhadap sistem politik

---

<sup>4</sup> Bambang Sunaryono, "Politik dan Pemerintahan Rusia, Silabus". Diktat Mata Kuliah

## 1. Teori Sosialisasi Politik (Gabriel A. Almond)<sup>10</sup>

Sosialisasi politik yang terdapat dalam setiap sistem politik, merupakan fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umumnya atau bagian-bagian dari penduduk atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrasi, judicial tertentu. Fungsi ini melibatkan keluarga, sekolah, media komunikasi, gereja, pekerjaan dan berbagai struktur politik.

Rekrutmen politik (*political recruitment*) merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. Komunikasi politik merupakan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

## 2. Sosialisasi Politik

### a. Definisi Konseptual

Untuk dapat memahami setiap sistem politik, sosialisasi politik merupakan kunci utama selain dari kebudayaan politik. Proses sosialisasi, yaitu proses 'pengajaran' nilai-nilai masyarakat, dalam hal ini nilai-nilai dan kebudayaan politik, kepada warganegara. Ada dua hal penting dalam proses sosialisasi ini. *Pertama*, sosialisasi politik berlangsung selama hidup seseorang. *Kedua*, pengaruh sosialisasi politik bisa langsung,

---

<sup>10</sup> Mohtar Mas'ood, Colin MacAndrews, "Perbandingan Sistem Politik", Gadjah Mada University Press, 2000. hal. 21

sendiri bukanlah *liberal democracy*, karena adanya pemilihan (*election*) yang sebenarnya hanyalah salah satu komponen dari demokrasi (liberal) secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Konsep *liberal democracy* yang dianut oleh Rusia diadopsi dari negara-negara barat yang lebih dulu demokratis. Sebagaimana dipahami menurut konsep/model barat, komponen-komponen yang mengusung sebuah *liberal democracy* adalah<sup>8</sup>:

- *Electoral* (pemilihan umum)
- *A balanced separation of power between the executive and legislative*
- *A balanced separation of power between central and regional governments*
- Adanya sistem kepartaian yang baik
- *A vibrant civil society* (semangat masyarakat yang madani)
- Supremasi hukum.

Akan tetapi dari semua nilai-nilai tersebut harus berhadapan dengan kuatnya pengalaman zaman Uni Soviet ketika masih berkuasa.

Adanya kemajuan atau perkembangan-perkembangan yang signifikan dalam menuju ke demokrasi liberal sampai setelah pemilu belum mulai nampak, hal ini bisa menjadi ancaman terhadap kesucian dan kemurnian (*sanctity*) pemilu itu sendiri sebagai sebuah lembaga (institusi) dari tertib politik Rusia yang baru,<sup>9</sup> Akan tetapi jika dibandingkan dengan periode sejarah Rusia sebelumnya (Uni

---

<sup>6</sup> *Kompas*, Minggu 19 September 2004

<sup>7</sup> Bambang Sunaryono, "Menuju Demokratisasi", Diktat Mata Kuliah Politik dan

Soviet) yang otoriter/totaliter selama 70 tahun lebih, serta ratusan tahun di bawah pemerintahan otokrasi rezim Tsar, kenyataan pemilu ini justru telah berlangsung secara *fair* dan demokratis.

Pada akhir dasawarsa 90'an Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin, menggantikan Boris Yeltsin. Rusia pada saat itu telah menjadi negara baru yang tentu saja memiliki landasan dan falsafah dasar negara yang berbeda dengan semasa Uni Soviet.

Rusia telah tumbuh menjadi negara baru yang demokratis, menjadi lebih terbuka dan menjadi bagian dari kehidupan politik internasional secara keseluruhan. Setelah 16 tahun semenjak rezim komunis tumbang, Rusia telah mengalami banyak sekali kemajuan dalam mengembangkan kehidupan politik dan lebih demokratis.

Untuk mendukung terjadinya demokratisasi di Rusia, Vladimir Putin membagi Rusia menjadi tujuh distrik dengan masing-masing administratifnya. Pemerintahan Rusia juga mengangkat utusan presiden yang bertugas mengawasi distrik tersebut dan memastikan mereka patuh terhadap peraturan federal.

Dalam pemerintahan pun Rusia secara sadar menganut dengan tegas adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif (a balanced separation of power between the executive and legislative). Kekuasaan legislatif merupakan pihak yang menjadi perumus dan yang mensahkan kebijakan eksekutif atau presiden, walaupun begitu diantara keduanya masih memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya.

Parlemen Republik Federasi Rusia menganut sistem bikameral atau kamar

1. Duma Rusia terdiri dari Duma Federasi (Federation Council) sebagai

kamar atas dan Duma Negara (The State Duma) sebagai kamar bawah (Article 94). Parlemen bertugas mengenalkan dan membahas undang-undang baru dan bertindak sebagai pemantau, melakukan fungsi *check and balance* terhadap pihak eksekutif, meskipun masih lemah terhadap kewenangan eksekutif.

Di bawah konstitusi, seorang Presiden Rusia memegang kekuasaan eksekutif yang sangat besar. Peran dan kekuasaan seorang presiden Rusia identik dengan seorang presiden Perancis. Seorang presiden Perancis adalah seorang kepala negara, merancang kebijakan-kebijakan, presiden dapat menjadikan sebuah maklumat sebagai sebuah hukum yang biasanya merupakan keputusan terakhir dalam pertikaian antara pihak legislatif dan eksekutif. Seorang Presiden Rusia dapat menggunakan kekuatan militer yang dimiliki oleh negara untuk tujuan tertentu meskipun tanpa adanya persetujuan dari Duma Negara dan sekaligus mempergunakan jajaran birokrasi eksekutifnya untuk menerapkan kebijakannya. Seorang presiden Rusia juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan menteri (termasuk Perdana Menteri) dan membubarkan Duma Negara (Parlemen).

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasar latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana perbandingan sosialisasi politik pada masa pemerintahan komunis Uni Soviet dan Rusia setelah reformasi?”

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk menganalisa dan menjelaskan permasalahan di atas penulis akan menggunakan Teori Sosialisasi Politik yang disampaikan oleh Gabriel A

definisi ini maka akan terlihat bagaimana sosialisasi yang terjadi di suatu negara dan dapat ditentukan dengan jumlah sehingga akan didapati data yang lebih *valid*.<sup>13</sup>

Dalam prakteknya sosialisasi politik ini dapat dijumpai di negara bagian manapun dengan masyarakat sebagai sasaran utamanya dan dengan menggunakan media yang akrab dengan masyarakat seperti, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, kelompok atau komunitas-komunitas, serta melalui media massa untuk menjangkau semua kalangan masyarakat, dalam bahasa lugasnya sosialisasi politik merupakan suatu cara mengenalkan politik kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Beberapa contoh sosialisasi politik di negara komunis Uni Soviet, yaitu dalam mengenalkan suatu ideologi kepada siswa pihak sekolah menentukan mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah di seluruh Uni Soviet yang berkaitan dengan ideologi-ideologi atau doktrin-doktrin komunis, yang merupakan keputusan dari negara. banyak dilaksanakan oleh negara-negara. Usaha-usaha dari partai komunis untuk menciptakan "orang-orang Soviet" dengan menggunakan tempat pekerjaan sebagai pusat organisasi dan pusat kegiatan partai sehingga orang-orang diluar partai pun nantinya akan ikut terlibat. Serta media massa di Uni Soviet yang hanya berisi tentang informasi-informasi dari partai komunis, mengenai nilai-nilai dari ideologi Marxisme tersebut. Bahkan di

---

<sup>13</sup> Mohtar Mas'ood, *Humor, Hukum dan Internasional: Ditinjau dari Masa Kini*, 1980, hal. 11

melalui pendidikan, maupun tidak langsung, akibat faktor-faktor latar belakang kehidupan dari seseorang.

Sosialisasi politik nantinya akan menunjukkan bahwa kebudayaan politik meliputi sikap-sikap dari warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan dan politiknya.<sup>11</sup> Dalam bahasa lugasnya sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan, dalam hal ini adalah memasyarakatkan politik.<sup>12</sup>

Disamping menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku, sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk membentuk dan mewariskan keyakinan-keyakinan politik atau kebudayaan politik suatu bangsa kepada generasinya yang disebut *trasmisi kebudayaan*. Sosialisasi politik juga dapat merubah kebudayaan politik, yaitu ketika masyarakat dihadapkan pada perubahan cara dalam menjalani kehidupan politik, seperti ketika terbentuk negara baru. Memelihara, merubah, dan menciptakan kebudayaan politik adalah macam-macam fungsi yang dijalankan oleh sosialisasi politik.

#### **b. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep, melalui

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 33.



definisi ini maka akan terlihat bagaimana sosialisasi yang terjadi di suatu negara dan dapat ditentukan dengan jumlah sehingga akan didapati data yang lebih *valid*.<sup>13</sup>

Dalam prakteknya sosialisasi politik ini dapat dijumpai di negara bagian manapun dengan masyarakat sebagai sasaran utamanya dan dengan menggunakan media yang akrab dengan masyarakat seperti, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, kelompok atau komunitas-komunitas, serta melalui media massa untuk menjangkau semua kalangan masyarakat, dalam bahasa lugasnya sosialisasi politik merupakan suatu cara mengenalkan politik kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Beberapa contoh sosialisasi politik di negara komunis Uni Soviet, yaitu dalam mengenalkan suatu ideologi kepada siswa pihak sekolah menentukan mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah di seluruh Uni Soviet yang berkaitan dengan ideologi-ideologi atau doktrin-doktrin komunis, yang merupakan keputusan dari negara. banyak dilaksanakan oleh negara-negara. Usaha-usaha dari partai komunis untuk menciptakan "orang-orang Soviet" dengan menggunakan tempat pekerjaan sebagai pusat organisasi dan pusat kegiatan partai sehingga orang-orang diluar partai pun nantinya akan ikut terlibat. Serta media massa di Uni Soviet yang hanya berisi tentang informasi-informasi dari partai komunis, mengenai nilai-nilai dari ideologi Marxisme tersebut. Bahkan di

lingkungan keluarga di Uni Soviet pun lebih diutamakan pengajaran nilai-nilai dan sikap-sikap dari ideologi komunis terhadap anggota keluarga yang lain.

### **3. Sarana Sosialisasi Politik**

Sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga. Beberapa diantaranya, seperti pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dengan sengaja dirancang demi tujuan sosialisasi politik, disamping juga untuk tujuan lain. Sarana lainnya, seperti kelompok bergaul dan bekerja, hanya cenderung untuk mempengaruhi sosialisasi politik secara tidak langsung.

Adapun sarana-sarana yang digunakan untuk sosialisasi politik ini antara lain, *keluarga*, pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Proses sosialisasi yang paling kuat dan kekal terjadi pada keluarga, dimana keluarga merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang.

*Sekolah*, orang-orang di dunia pendidikan akan lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik, dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya. Pengetahuan dan pandangan-pandangan konkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik diberikan oleh sekolah kepada anak didiknya, yang juga merupakan saluran pewarisan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya. Sekolah juga memegang peranan penting dalam memberikan "aturan permainan politik", bagaimana sikap-sikap yang nantinya akan terbentuk dalam diri masyarakat

*Kelompok pergaulan.* Perasaan ingin disukai, menyukai atau menghormati dapat membuat seseorang yang berada dalam suatu kelompok menyesuaikan pendapatnya. Sarana ini juga dapat dengan mudah mengubah sikap seseorang terhadap pandangan politik yang telah dibentuk oleh keluarga dan sekolah sejak lama hanya karena ingin menjadi satu bagian dengan mereka.

*Pekerjaan.* Pekerjaan merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas. Melalui pekerjaan seseorang atau individu-individu dapat mengidentifikasikan diri dengan suatu kelompok tertentu dan menggunakan kelompok tersebut sebagai acuan dalam kehidupan politik.

*Media massa.* Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat dan seragam secara umum. Informasi peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dimana saja di dunia dapat segera menjadi pengetahuan. Masyarakat dunia dapat segera menjadi suatu kelompok penonton tunggal yang dapat bergerak bersama-sama dalam mendukung atau menentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di negara-negara di dunia. Media massa juga menyampaikan nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak. Sistem media massa yang terkendali merupakan sarana kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan politik.

*Kontak-kontak politik langsung.* Pandangan terhadap dunia politik dapat berubah dengan seketika apabila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa masuk wajib militer. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis-krisis politik luar negeri dan

----- dan ----- badan pemerintah terhadap tuntutan tuntutan

individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan untuk mematuhi hukum.

#### **F. Hipotesa**

Berdasar latar belakang masalah dari perumusan masalah yang didekati dengan kerangka dasar teori yang diperlukan, maka didapati kesimpulan sementara bahwa terdapat perbedaan proses sosialisasi politik pada pemerintahan komunis Uni Soviet dan Rusia pasca reformasi yang nantinya akan memberi pengaruh terhadap fungsi dari sistem politik.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data, maka penulisan skripsi ini dibatasi pada masa pemerintahan komunis Uni Soviet dimulai dari pemerintahan Joseph Stalin dan pada masa pemerintahan Rusia (Vladimir Putin) yaitu, setelah terjadi perubahan besar dalam sistem politik oleh Mikhail Gorbachev.

#### **H. Metode Penelitian**

Untuk melaksanakan penelitian skripsi ini, penulis mengumpulkan data dengan metode penelitian kepustakaan serta informasi data berupa literatur, jurnal, artikel serta data-data yang diperoleh dari *browsing* internet.

#### **I. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Pada bab ini berisikan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Membahas tentang perubahan umum negara Rusia

**BAB III** : Membahas tentang profil Mikhail Gorbachev dan gambaran umum sistem politik Uni Soviet; dan profil Vladimir Putin serta gambaran umum sistem politik Rusia.

**BAB IV** : Membahas tentang perbandingan; persamaan dan perbedaan sosialisasi politik pada masa pemerintahan Komunis Uni Soviet dan setelah reformasi pada masa Rusia.

- Penerapan sosialisasi politik pemerintahan Komunis di Uni Soviet ;
- Penerapan sosialisasi politik pemerintahan Rusia setelah reformasi (Vladimir Putin).

**BAB V** • Kesimpulan merupakan uraian dari Bab I sampai Bab IV